

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini yaitu Kantor Bersama SAMSAT Kota Tasikmalaya. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Samsat Kota Tasikmalaya. Variabel ini menggunakan variabel indenpeden dan variabel dependen.

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Wajib pajak yang kendaraanya terdaftar di Kantor Samsat Kota Tasikmalaya, yang terdiri dari 10 Kecamatan yangberada di Kota Tasikmalaya.

##### **3.1.1 Sejarah Singkat Samsat Kota Tasikmalaya**

Sejarah Samsat Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (PERSERO). Latar belakang terbentuknya SAMSAT di seluruh Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri NO.POL KEP/13/XII/76 Nomor: KEP-1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat 1, Komando Daerah kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.

Dasar hukum pembentukan SAMSAT di seluruh Indonesia adalah instruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri

keuangan dengan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Tujuan dibentuk SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLJJ. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SAMSAT mengacu pada Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah serta Direktur Utama PT. Jasa Raharja (PERSERO) dengan Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 973-1228, Nomor SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. SAMSAT merupakan sistem pelayanan publik yang dikelola oleh tiga instansi berbeda. Oleh karena itu untuk memudahkan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan dibentuk Tim Pembina SAMSAT Pusat dan Provinsi. Tim Pembina pusat berkedudukan di Jakarta. Sedangkan Tim Pembina SAMSAT Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi. Aparat pelaksanaan SAMSAT terdiri atas

Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT.Jasa Raharja (PERSERO) cabang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masing-masing ketiga instansi yang ada di SAMSAT memiliki tugas dan kewenangannya sendiri. Berikut adalah pembagian tugas dan wewenang masing-masing instansi:

1. Unit Pelayanan : Petugas Dispenda dan Polri.
2. Unit Administrasi : Petugas Dispenda, POLRI dan Jasa Raharja.
3. Unit Pembayaran : Petugas Dispenda (Bendaharawan Samsat Penerima).
4. Unit Pencetakan : Petugas Dispenda dan POLRI.
5. Unit Penyerahan : Petugas POLRI.
6. Unit Arsip : Petugas POLRI dan Dispenda.
7. Unit Informasi : Petugas POLRI dan Dispenda.

SAMSAT Kota Tasikmalaya merupakan salah satu unit SAMSAT kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Selain di Kota Tasikmalaya terdapat juga SAMSAT Kabupaten Sukaraja. SAMSAT Kota Tasikmalaya beralamat di Jalan Ir. H. Juanda (By Pass) Tasikmalaya. Latar belakang terbentuknya Samsat Kota Tasikmalaya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kepemilikan, pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana lalu lintas kecelakaan Jasa Raharja.

Tujuan dibentuknya SAMSAT Kota Tasikmalaya adalah untuk memberikan pelayanan, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan Jasa Raharja. Berikut adalah

pembagian tugas dan wewenang dari tiga instansi yang berkoordinasi di SAMSAT Kota Tasikmalaya:

1. DITLANTAS POLDA JABAR mempunyai fungsi dan kewenangan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, pemeliharaan dan pengamanan rekaman atau berkas.
2. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat bertugas di bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Tasikmalaya berwenang di bidang pengutipan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum dan Pelayanan Klaim Asuransi Jasa Raharja.

SAMSAT Kota Tasikmalaya merupakan sistem kerjasama terpadu antara Direktorat Kepolisian Lalu Lintas Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya dan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Tasikmalaya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya SAMSAT memiliki visi, misi, dan maklumat pelayanan yang dijadikan acuan untuk pengembangan dalam mencapai tujuan dibentuknya SAMSAT. Adapun visi, misi, dan maklumat pelayanan SAMSAT Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Visi:

“Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah Yang Amanah dan Akuntabel”

## 2. Misi:

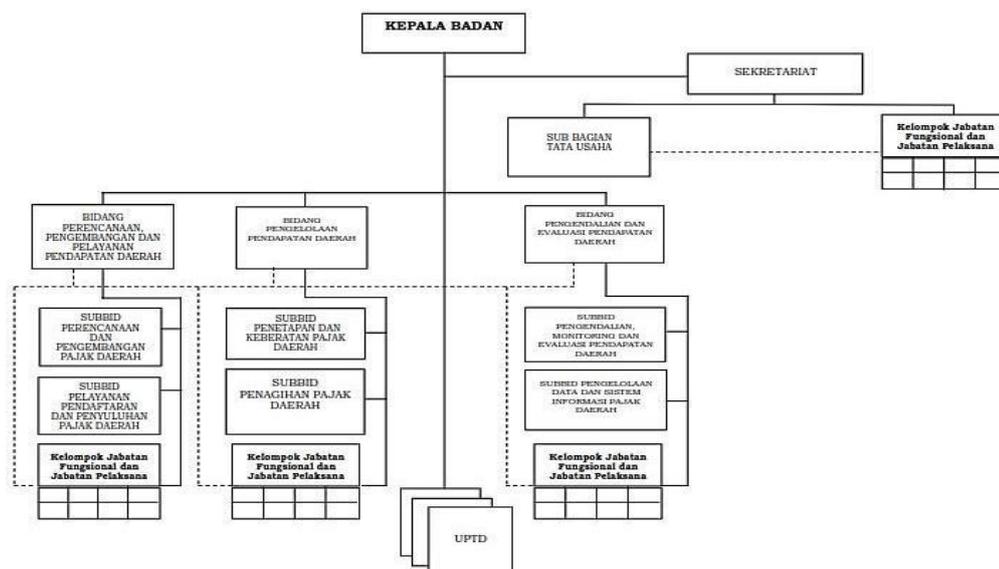
“Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah Yang Makin Optimal”

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Berdaya Saing”

## 3. Maklumat Pelayanan:

“Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan. Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”.

### 3.1.2 Struktur Organisasi SAMSAT Kota Tasikmalaya



Sumber: Bapenda Kota Tasikmalaya, 2023

## 3.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan Survei.

Metode Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi

atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2019: 15).

Pengertian Survey menurut Sugiyono (2018) adalah: “metode survey adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologi dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk di generalisasikan”.

### **3.2.1 Operasionalisasi Variabel**

Menurut Sugiyono (2019:68) Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Operasionalisasi variabel berfungsi sebagai konsep-konsep yang berupa kerangka untuk mengidentifikasi variabel-variabel menjadi kategori data agar pengolahan data dalam penelitian lebih mudah dilakukan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat variabel yang sesuai dengan judul skripsi yaitu “Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar wajib

pajak kendaraan bermotor”. Empat variabel tersebut terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Variabel Bebas / Independen (Variabel X1, X2 dan X3)

Dalam Penelitian ini Variabel bebasnya adalah sebagai berikut:

1) Kesadaran wajib pajak (X1)

Kesadaran wajib pajak, dengan indikator, Mengerti dan memahami pajak, sadar akan fungsi pajak, Kesadaran akan tujuan pajak

2) Kualitas Pelayanan (X2).

Kualitas Pelayanan, dengan indikator, Kondisi Fisik (Tangible), Keandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Empati (Empathy), Jaminan (Assurance).

3) Sanksi Perpajakan (X3) .

Sanksi Perpajakan, dengan indikator, Displin Membayar pajak, Terdapat Sanksi administrasi dan Sanksi pidana, Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, Penerapan Sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Variabel Tidak Bebas (Dependen)

Kepatuhan wajib Pajak, dengan Indikator, patuh terhadap peraturan, kelengkapan, pengisian formulir, ketepatan waktu pembayaran, Variabel-variabel tersebut didefinisikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kesadaran Wajib pajak (X1)	Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Siti Kurnia ( 2017: 191)	-Kesadaran untuk mengerti dan memahami pajak. -Kesadaran akan fungsi pajak. -Kesadaran akan tujuan pajak	Interval
Kualitas Pelayanan (X2)	Kualitas Pelayanan di definisikan sebagai tindakan atau perbuatan Seorang atau organisasi bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan ataupun karyawan. Kasmir 2017: 47)	-Kondisi Fisik (Tangible) -Kehandalan (Reliability) -Daya Tanggap (Responsiveness) -Empati(Empathy). - Jaminan (Assurance)	Interval
Sanksi Perpajakan(X3)	Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi atau ditaati sehingga dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Mardiasmo (2018:62).	-Displin Membayar pajak -Terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana . -Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. -Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.	Interval
Kepatuhan WajibPajak (Y)	Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Siti Kurnia Rahayu (2017: 193)	-patuh terhadap peraturan -kelengkapan pengisian formulir -ketepatan waktu pembayaran	Interval

### 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.2.2.1 Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer. Data primer diperoleh peneliti secara langsung dari subjek yang diteliti tanpa melalui perantara. Data primer dalam penelitian ini bersumber

dari wajib pajak yang kendaraannya terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kuesioner

Pada penelitian ini jenis kuesioner yang digunakan dalam metode pengumpulan data adalah *personally-administered questionnaire*. Menurut Zulgarnef (2018) *personally-administered questionnaire* adalah kuesioner yang dirancang dan diberikan sendiri oleh peneliti dan diisi secara pribadi oleh responden. dari penjelasan di atas maka kuesioner peneliti akan langsung disampaikan kepada wajib pajak kendaraan pribadi yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tasikmalaya.

### **3.2.2.2 Populasi Sasaran Dan Sampel**

Populasi merupakan salah satu hal yang paling penting dan perlu diperhatikan dengan seksama agar penelitian dapat menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercayadan tepat sasaran. Menurut Sue dan Ritter dalam Swarjana (2022: 4) Populasi adalah keseluruhan kelompok, individu-individu, kelompok, atau objek dimana peneliti ingin menggeneralisasikan hasil penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang kendaraannya terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tasikmalaya. Menurut data yang diperoleh peneliti dari Januari 2020 sampai dengan Desember 2022 jumlah yang membayar pajak kendaraan bermotor sejumlah 48,917 unit.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang tercatat di Kantor Samsat Kota Tasikmalaya Pada Tahun 2020-2022

**Tabel 3.2**  
**Rekap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 – 2022**

No	Tahun	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
1	2020	9.959 Unit
2	2021	9 286 Unit
3	2022	10.319 Unit

Sumber: Kantor Sistem Administrasi Mamunggal Satu Atap ( SAMSAT)  
KotaTasikmalaya, 2023

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Menggunakan teknik *Accidental sampling*. Menurut Sugiyono (2019) teknik accidental sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah: 1) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Bersama Kota Tasikmalaya. 2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang mengurus kewajiban pajaknya sendiri dan bukan biro jasa. Besarnya ukuran samapel dihitung dengan menggunakan rumus Slovin, Rumus Slovin Menurut Sugiyono(2019: 137) untuk mencari dan menentukan jumlah sampel berikut ini:

$$N = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

$e$  = error atau tingkat kesalahan yang ditetapkan, namun masih dapat ditolelir. Tingkat kesalahan yang ditetapkan adalah sebesar 5%

Dari notasi diatas,  $n$  adalah jumlah sampel minimal, nilai  $N$  adalah populasi sedangkan nilai  $e$  adalah batas kesalahan. Dalam penelitian ini terdapat populasi sebanyak 10,319 Unit kendaraan bermotor, dan margin of error sebesar 5%. Jadi jumlah sampelnya adalah

$$N = \frac{10,319}{2a1 + 10,319.,0,2}$$

$$N \frac{10,319}{1,0257975} = 89.956 \text{ Di Sesuaikan oleh peneliti menjadi } 100$$

Berdasarkan perhitungan rumus slovin sampel minimal yang harus dilakukan 100 responden.

### 3.2.2.3 Prosedur Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2019: 194) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun Sumber data yang digunakan adalah data primer karena data sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Pengumpulan data primer ini yang dilakukan peneliti dengan menyebarkan kuesioner pada Wajib Pajak Pendaran motor yang terdaftar di kantor samsat Kota Tasikmalaya dan menerima data langsung dari responden tanpa melauai perantara dengan memberi seperangkat pertanyaan secara langsung kepada respoden. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data primer dengan menggunakan metode sebagai berikut:

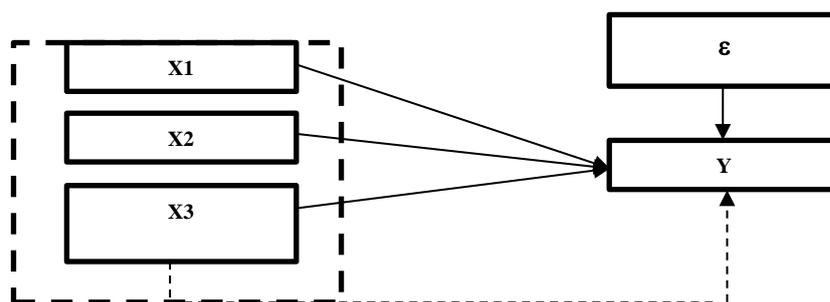
1. Wawancara Sugiono (2015: 137) mengemukakan bahwa interview dipakai

sebagai teknik pengumpulan data bila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan dalam menemukan fenomena yang wajib diteliti, apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal berdasarkan responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Peneliti menggunakan teknik interview tatap muka antara pihak penanya dan pihak yang ditanya.

2. Kuesioner ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup dan terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui internet.

### 3.2.2 Model Penelitian

Berdasarkan operasionalisasi variabel penelitian, maka paradigma yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:



**Gambar 3.1**  
**Model Penelitian**

Keterangan :

$X_1$  = Kesadaran Wajib Pajak

$X_2$  = Kualitas Pelayanan

$X_3$  = Sanksi Perpajakan

$Y$  = Kepatuhan Wajib Pajak

$\varepsilon$  = Residual (Variabel lain yang mempengaruhi  $Y$  namun tidak diteliti oleh penulis)

—————▶ = Pengaruh secara Parsial

-----▶ = Pengaruh Secara Simultan

### **3.3 Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2019), analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, tes, kuisisioner, dan observasi terstruktur dengan cara menyusun data ke dalam kategori pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.

#### **3.3.1 Analisis Regresi Berganda**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda karena terdapat asumsi yang terdapat pengaruh antara variabel independent. Dalam regresi berganda, variabel  $Y$  tergantung dua atau lebih variabel. Teknik ini digunakan untuk memperhitungkan dan memperkirakan secara kuantitatif beberapa faktor secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat kota tasikmalaya, pengujian hipotesis, serta dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan.

### 3.3.2 Uji Instrumen

Setelah mendapatkan data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data tersebut untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Sebelum memulai analisis data, langkah yang penting adalah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap kuesioner yang telah disebar.

#### 3.3.2.1 Uji Validitas

Menurut Menurut Ghozali (2019) uji validitas dalam sebuah penelitian digunakan sebagai pengukur sah atau tidaknya sebuah kuesioner. Kuesioner dianggap valid apabila pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner dapat menggambarkan sesuatu yang akan diukur. Validitas suatu instrument yaitu seberapa jauh instrument tersebut benar-benar mengukur objek apa yang hendak diukur. Semakin tinggi validitas instrument, makin baik instrument itu untuk digunakan.

Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi dari masing-masing pernyataan dengan skor total. Rumus yang digunakan adalah produk moment sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan :

r = Koefisien Korelasi

x = Jumlah Skor item

y = Jumlah Skor Total ( seluruh item )

n = Jumlah Responden.

Jika dari analisis tersebut diperoleh  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka data tersebut adalah signifikan atau valid yang berarti layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Setelah ditentukan bahwa pernyataan-pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini valid, maka selanjutnya dilanjutkan dengan uji reabilitas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diambil menggunakan kuesioner, maka sebelum melakukan analisis terhadap instrumen penelitian yang akan digunakan, diperlukan juga pengujian validitas agar hasil yang diperoleh dapat teruji dan dapat menghindari hal-hal yang bisa merugikan hasil penelitian. Alat ukur yang digunakan yaitu software SPSS versi 26. Berikut hasil uji validitas dari variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Nomor Item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Kesimpulan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,762	0,197	Valid
	X1.2	0,776	0,197	Valid
	X1.3	0,816	0,197	Valid
	X1.4	0,631	0,197	Valid
	X1.5	0,695	0,197	Valid
	X1.6	0,459	0,197	Valid
Kualitas Pelayanan (X2)	X2.1	0,610	0,197	Valid
	X2.2	0,633	0,197	Valid
	X2.3	0,531	0,197	Valid
	X2.4	0,788	0,197	Valid
	X2.5	0,750	0,197	Valid
	X2.6	0,712	0,197	Valid
	X2.7	0,727	0,197	Valid
	X2.8	0,835	0,197	Valid
	X2.9	0,698	0,197	Valid
	X2.10	0,345	0,197	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	0,829	0,197	Valid
	X3.2	0,779	0,197	Valid
	X3.3	0,794	0,197	Valid
	X3.4	0,788	0,197	Valid

	X3.5	0,793	0,197	Valid
	X3.6	0,666	0,197	Valid
	X3.7	0,618	0,197	Valid
	X3.8	0,643	0,197	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,854	0,197	Valid
	Y2	0,785	0,197	Valid
	Y3	0,690	0,197	Valid
	Y4	0,718	0,197	Valid
	Y5	0,683	0,197	Valid
	Y6	0,700	0,197	Valid

Sumber : Data Primer yang Diolah Menggunakan SPSS 26 (2024) (Lampiran 5)

Berdasarkan hasil tabel 3.3 untuk pengujian validitas dilihat bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dengan 6 item pernyataan, Kualitas Pelayanan (X2) dengan 10 item pernyataan, Sanksi Perpajakan (X3) dengan 8 item pernyataan, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan 6 item pernyataan. Diperoleh hasil seluruh nilai  $r_{hitung}$  untuk item pertanyaan kuesioner pada variabel penelitian yang digunakan menghasilkan nilai  $r_{hitung}$  yang lebih besar dari pada nilai  $r_{tabel}$ . Dapat dilihat dari perbandingan  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  yang bernilai 0,197 dari  $r_{tabel}$  5% (0,05). Maka seluruh pernyataan dinyatakan valid.

### 3.3.2.2 Uji Realibilitas

Menurut Ghozali (2020) reliabilitas adalah salah satu cara mengukur sebuah kuesioner yang terdiri dari indikator dari sebuah peubah ataupun konstruk. Pengukuran reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasi antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan Statistical Program for Society Science (SPSS), dengan fasilitas Alpha Cronbach. Reliabel atau tidaknya variabel ditunjukkan dengan nilai alpha cronbach  $> 0,60$ . Dengan rumus yang dihitung :

$$\alpha = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan:

$\alpha$  = Koefisien reabilitas alpha

$k$  = Banyak butir pertanyaan dan butir soal

$\sum \sigma_b^2$  = Jumlah variasi butir

$\sigma_t^2$  = Variasi total

Menurut Ghozali (2018:53) dalam uji reliabilitas data digunakan metode Cronbach alpha, instrument dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan hasil pengujian reliabilitas variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu:

**Tabel 3.4**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Cronbach Alpha	Item	Keterangan
1	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,780	6	Reliabel
2	Kualitas Pelayanan (X2)	0,852	10	Reliabel
3	Sanksi Perpajakan (X3)	0,881	8	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,827	6	Reliabel

Sumber : Data Primer yang Diolah Menggunakan SPSS 26 (2024) (Lampiran 6)

Dengan perhitungan tersebut, maka diketahui nilai cronbach's alpha variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 0,780, Kualitas Pelayanan (X2) sebesar 0,852, Sanksi Perpajakan (X3) sebesar 0,881, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,827. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel, karena cronbach's alpha > 0.60.

### **3.3.3 Uji Asumsi Klasik**

Uji Asumsi Klasik, Pengujian persyaratan analisis digunakan sebagai persyaratan dalam penggunaan model analisis regresi linear berganda. Suatu model regresi harus dipenuhi syarat-syarat bahwa data berdistribusi normal, memiliki hubungan yang linear, tidak terjadi multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Jika tidak ditemukan maka dilanjutkan dengan pengujian hipotesis dengan analisis regresi. Dalam regresi linier, untuk memastikan agar model tersebut BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) dilakukan pengujian.

#### **3.3.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen, variabel dependen, dan keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Langkah yang digunakan dalam program software spss 26 untuk menguji normalitas variabel yang digunakan.

Untuk mengetahui apakah model regresi berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas Jarque Bera (JB) dengan tingkat signifikansi.

Pada penelitian ini besarnya tingkat signifikansi sebesar 5%. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai probability Jarque Bera (JB) > signifikansi (0,05) maka model regresi

atau residualnya berdistribusi normal.

2. Jika probability Jarque Bera (JB) < signifikansi (0,05) maka model regresi atau residualnya tidak berdistribusi normal.

Adapun dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Apabila data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

### **3.3.3.2 Uji Multikolineartitas**

Uji Multikolinearitas mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi atau hubungan antar variabel bebas dalam model regresi. Multikolinearitas menerangkan bahwa terdapat hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau hampir seluruh variabel bebas dalam model. Hal ini mengakibatkan koefisien regresi tidak tertentu dan kesalahan standarnya tidak terhingga, hal ini akan menimbulkan bias dalam spesifikasi.

Untuk mengetahui suatu model mengalami multikolonearitas atau tidak bisa dilihat dari ciri-ciri yang bisa kita temukan, Adapun ciri-cirinya yaitu sebagai berikut:

1. Terjadi perubahan yang berarti pada koefisien model regresi (misalnya, nilai menjadi lebih besar atau lebih kecil) apabila dilakukan penambahan atau pengurangan sebuah variabel bebas dari model regresi.

2. Diperoleh nilai R-Square yang besar, sedangkan koefisien regresi tidak signifikan pada uji parsial.
3. Nilai standard error untuk koefisien regresi menjadi lebih besar dari yang sebenarnya (overestimated).

Salah satu cara untuk melakukan uji multikolinearitas yaitu dengan melihat dari Variance Inflation Factors (VIF) , adapun pedoman untuk mengambil suatu keputusan yakni sebagai berikut:

1. Jika nilai Variance Inflation Factors (VIF)  $> 10$  maka disimpulkan adanya multikolinearitas antara variabel bebas.
2. Jika Variance Inflation Factors (VIF)  $< 10$  , maka disimpulkan tidak terdapat persoalan multikolinearitas antara variabel bebas.

### **3.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah, apabila dalam regresi terdapat homokedastisitas, yaitu apabila varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap.

Sebaliknya apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara uji white yaitu dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Prob. Chi-Square  $< 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ), maka artinya terjadi gejala heteroskedista.
2. Jika Prob. Chi-Square  $> 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ), maka artinya tidak terjadi gejala heteroskedistas.

### 3.3.4 Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2018) uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi merupakan antara nol dan satu.

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dinyatakan dalam persentase dan berkisar antara  $0 \leq R^2 \leq 1$ . Keputusan uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai  $R^2$  mendekati nol maka diantara variabel independen dan variabel dependen tidak terdapat keterkaitan; dan
2. Jika nilai  $R^2$  mendekati satu maka diantara variabel independen dan variabel dependen terdapat keterkaitan.

### 3.3.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan sebuah pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis ini akan dilakukan baik secara parsial maupun secara simultan.

Sunyoto (2016: 29) menjelaskan bahwa tujuan dari uji hipotesis adalah menguji perhitungan statistik, mean, dan proporsi dari satu atau dua sampel yang diteliti. Pengujian ini dinyatakan hipotesis yang saling berlawanan yaitu apakah hipotesis awal (nihil) diterima atau ditolak. Hipotesis nol ( $H_0$ ) merupakan

hipotesis yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Sementara hipotesis alternatif ( $H_a$ ) merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

#### 1) Uji Hipotesis secara Simultan

Menurut Ghozali (2018) uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen).

$H_0$ : Kesadaran wajib pajak, Kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

$H_4$ : Kesadaran wajib pajak, Kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Dengan kriteria:

1. Jika  $F\text{-statistik} > F\text{-tabel}$  atau probabilitas  $<$  nilai signifikan ( $\text{Sig.} \leq 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak  $H_4$  diterima.

2. Jika  $F\text{-statistik} < F\text{-tabel}$  atau probabilitas  $>$  nilai signifikan ( $\text{Sig.} \geq 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima  $H_4$  ditolak.

#### 2) Uji Hipotesis Secara Parsial

Menurut Ghozali (2018; 88) Uji t digunakan untuk menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen.

$H_0$ : Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_1$ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

$H_0$ : Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_2$  : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_0$ : Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_3$  : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan kriteria:

(1) Jika  $t\text{-statistik} < t\text{-tabel}$  atau tingkat signifikansi  $> 0,05$ ,  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak.

(2) Jika  $t\text{-statistik} > t\text{-tabel}$  atau tingkat signifikansi  $< 0,05$ ,  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima.

3) Simpulan

Proses pengujian hipotesis apakah teruji atau ditolak.